2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	ROSMALADEWI AMIR, S.E.	ISTRI	MALILI , 4 April 1974 / PEREMPUAN	PNS KAB. LUWU TIMUR	jl.SAWERIGADING, Kelurahan MALILI, Kecamatan MALILI, Kabupaten/Kota LUWU TIMUR, Provinsi SULAWESI SELATAN
2	FARHAN KEISYA ANUGRAH ERWIN	ANAK TANGGUNGAN	SOROWAKO , 18 Oktober 2002 / LAKI-LAKI	PELAJAR	jl.SAWERIGADING, Kelurahan MALILI, Kecamatan MALILI, Kabupaten/Kota LUWU TIMUR, Provinsi SULAWESI SELATAN

3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	SEKRETARIS	PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIAT

4. DATA HARTA

4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : JL. SAWERIGADING Kel. / Desa : KELURAHAN MALILI Kecamatan : MALILI Kab. / Kota : LUWU TIMUR Prov. / Negara : SULAWESI SELATAN / INDONESIA	Tanah: 540 m^2 Bangunan: 250 m^2	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 604 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: TEMPAT TINGGAL Tahun Perolehan: 2016	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	TETAP
			Sub Total		Rp. 700.000.000	

Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 24/01/2022

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL Merk : SUZUKI SWIFT Model : MINIBUS Tahun Pembuatan : 2008 No. Pol. / Registrasi : DD 1494 AU	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: LAINNYA (AIDA ANDRIANY ARKIANG) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: AIDA ANDRIANY ARKIANG Tahun Perolehan: 2013	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000	TETAP
		Sub Total		Rp. 90.000.000	

4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : BARANG ELEKTRONIK Jumlah : 3 Satuan : UNIT Ket. Lainnya : hp oppo, mesin cuci, ac Tahun Perolehan: 2019	HASIL SENDIRI	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	TETAP
2	Jenis : BARANG ELEKTRONIK Jumlah : 1.00 Satuan : SET Ket. Lainnya : - Tahun Perolehan: 2009	HASIL SENDIRI	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	TETAP
3	Jenis : PERABOTAN RUMAH TANGGA Jumlah : 1.00 Satuan : SET Ket. Lainnya : -	HASIL SENDIRI	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	TETAP

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
	Tahun Perolehan: 2009				
		Sub Total		Rp. 21.000.000	

4.4. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
			Sub Total		Rp. 0	

4.5. KAS / SETARA KAS

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BNI	Nomor : 0586253873 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 16.034.049	BARU
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BANK SULSELBAR	Nomor : 093-201-00000764-2 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 14.956.110	UBAH
			Sub Total	Rp. 30.990.159	

4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Sub Total		Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	BANK SULSELBAR	SK PNS	Rp. 353.000.000	Rp. 351.072.904
			Sub Total	Rp. 353.000.000	Rp. 351.072.904

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 148.674.044	Rp. 98.166.904
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 0	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 0	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
	Sub Total	Rp. 148.674.044	Rp. 98.166.904

5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6. PENGELUARAN

6.1. PENGELUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 126.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 5.700.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 2.550.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 91.955.148
	Sub Total	Rp. 226.205.148

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

2021

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 841.990.159	Rp. 351.072.904	Rp. 490.917.255

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.